

**Analisis Kesadaran Pengusaha UMKM Dalam Kepemilikan
NPWP Pada Pengusaha UMKM
Pasar Km 5 Kota Palembang**

***An Analysis Of MSME Awereness In Npwp Ownership MSME Km
5 Market In Palembang City***

Novryzal¹⁾*, Yuhanis Ladewi ²⁾, Saekarini Yuliachtri³⁾

1) Program studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia

*Corresponding Email: yuhanisladewi@ymail.com

Abstrak

Rumusan dalam penelitian ini adalah Bagaimana tingkat kesadaran pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Pasar KM 5 dalam kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tujuannya Untuk mengetahui tingkat kesadaran pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Pasar KM 5 dalam kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 123 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di pasar km 5 kota Palembang. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 55 responden. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan kuisioner. Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Pasar Km 5 Kota Palembang selaku narasumber dan responden pada penelitian ini masih sangat kurang hal ini di akibatkan oleh kurangnya pengetahuan akan perpajakan serta tingkat ekonomi yang masih rendah dan kurangnya sosialisasi yang di berikan pemerintah.

Kata Kunci: Kesadaran, Kepemilikan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Abstract

The formulation in this study is how the level of awareness of MSME entrepreneurs in KM S Market in the obligation to have a Taxpayer Identification Number The goal is to determine the level of awareness of MSME entrepreneurs in KM 5 Market in the obligation to have a Taxpayer Identification Number. This rescarch is a descriptive research The population used in this study were 123 SMES in the km 5 market of Palembang city. The sample in this study were 55 respondents. The data collection methods used in this study were interviews and questionnaires The data analysis used in this research is qualitative analysis. The results of this study indicate that the awareness of ownership of a Taxpayer Identification Number (NPWP) in the Micro, Small and Medium Enterprises (Umkm) Pasar Km 5 Palembang City as sources and respondents in this study is still lacking due to a lack of knowledge of taxation and the economic level that is still low. low and lack of socialization provided by the government.

Keywords: Awareness, Ownership, Taxpayer Identification Number (NPWP)

How to Cite: Novryzal, Yuhanis Ladewi dan Saekarini Yuliachtri. (2020 Analisis Kesadaran Pengusaha UMKM Dalam Kepemilikan Npwp Pada Pengusaha UMKMPasar Km 5 Kota Palembang.

PENDAHULUAN

kesadaran UMKM dalam Kepemilikan NPWP seperti yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM provinsi Bali Gede Indra (2018) yang mengatakan bahwa belum semua pelaku UMKM memegang NPWP. menurutnya, hampir 50% dari UMKM yang belum memiliki NPWP adalah yang pelaku usaha mikro. Begitu juga seperti yang disampaikan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Yuli Kristiyono mengatakan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sudah memiliki kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masih rendah. Di DIY, jumlahnya baru mencapai sekitar 30%.

Saya pun melakukan survei pendahuluan di PD Pasar km5 untuk melihat bagaimana kondisi sebenarnya mengenai kesadaran UMKM dalam kepemilikan NPWP dengan cara melakukan wawancara terhadap 5 UMKM yang terdapat pada pasar tersebut. Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh data pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Survei Pendahuluan

| Umkm | Hasil Survei Pendahuluan |
|---------------------------|---|
| Suhaimi (Toko Klontongan) | Suhaimi Mengatakan bahwa dia tidak memiliki NPWP serta dia pun tidak tau apa itu NPWP.dia pun tidak tau jika UMKM pun memiliki kewajiban untuk membayar pajak |

| | |
|--|--|
| | penghasilan Umkm. Suhaimi mengatakan dia tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait kewajiban perpajakan. |
| Nurhayati (Toko Pakaian) | Nurhayati mengatakan bahwa dia tidak memiliki NPWP serta dia pun tidak tau apa itu NPWP.dia pun tidak tau jika UMKM pun memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan Umkm. Nurhayati mengatakan dia tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait kewajiban perpajakan. |
| Hendra Gunawan Toko mabel (penjual kasur lemari dll) | Hendra Gunawan mengatakan bahwa dia tidak memiliki NPWP serta dia pun tidak tau apa itu NPWP.dia pun tidak tau jika UMKM pun memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan Umkm. Hendra mengatakan dia tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait kewajiban perpajakan. |
| Mar Intan (Toko emas) | Mar Intan mengatakan bahwa dia tidak memiliki NPWP serta dia pun tidak tau apa itu NPWP.dia pun tidak tau jika UMKM pun memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan Umkm. Mar intan mengatakan dia tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait kewajiban perpajakan. |
| Macap (Toko Bumbu) | Macap Mengatakan bahwa dia tidak mengetahui tentang pajak yang harus di bayarkan oleh Umkm. Serta mengatakan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang pajak umkm ini sehingga mereka tidak tau menau tentang pajak ini. Macap pun mengatakan bahwa dia belum memiliki NPWP Serta tidak mengerti apa itu NPWP. |

Sumber: penulis, 2020

Dari hasil wawancara yang saya lakukan pada umkm di pasar km5 didapatkan bahwa rata rata pelaku umkm pasar km5 tidak memiliki NPWP serta mereka pun tidak tau apa itu NPWP

mereka tidak tau bahwa UMKM juga memiliki kewajiban perpajakan yang harus mereka penuhi sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku sekarang.

Berdasarkan uraian di atas, serta penelitian yang dilakukan Shofuro (2016), Putu dan Ketut (2014), Megahsari (2015), Zulfi (2017), Meri, dkk (2015) dan Ardo (2016) yang mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP. Maka permasalahan yang dapat di kemukakan dalam penelitian ini adalah Bagaimana tingkat kesadaran pengusaha UMKM di Pasar KM 5 dalam kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai identitas perpajakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya menurut (Siti 2019:23, Mardiasmo 2016:29, dan Leo 2017:6).

Kesadaran Wajib Pajak

kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengerti atau sadar kewajiban untuk mematuhi kewajiban pajaknya menurut (Yuniarto 2018:16,

Kennet dan Collen 2017:186, Siti 2017:196-198, dan Ahmad 2015:239).

Pengukuran Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Siti (2017:192) terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi pengukuran kesadaran wajib pajak yaitu :

1. Sosialisasi Perpajakan
2. Kualitas Pelayanan.
3. Kualitas individu wajib pajak
4. Tingkat pengetahuan wajib pajak.
5. Tingkat ekonomi wajib pajak
6. Persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan ekonomi yang produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi menurut (Wuisang, dkk 2019:58, Arini 2018:10, Azrul 2017: 90, dan Wiratna 2019: 8-9).

METODOLOGI PENELITIAN

penelitian kali ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan Populasi sebanyak 123 UMKM di pasar km 5 kota Palembang dengan menggunakan sample random sampling rumus slovin dengan batas kesalahan 10% dengan tingkat akurasi 90%. Berdasarkan metode

penentuan sampel tersebut jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 55 UMKM pada pasar km 5 kota Palembang sedangkan untuk Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner dengan responden dan wawancara dengan narasumber yaitu pelaku usaha UMKM pada Pasar Km5 kota Palembang. Sedangkan untuk teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis kualitatif yaitu dengan cara memberikan uraian penjelasan mengenai kesadaran UMKM dalam kepemilikan NPWP.

HASIL

Tingkat Pengembalian Kuesioner

Tabel IV.1
Tingkat Pengembalian Kuesioner

| Keterangan | Jumlah | Persentase |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|
| Kuesioner yang disebar | 59 | 100% |
| Kuesioner yang kembali dan terisi | 59 | 100% |
| Kuesioner yang tidak kembali | 0 | 0% |
| Kuesioner yang diolah | 55 | 93% |

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Tabel IV.1 menjelaskan bahwa kuesioner yang didistribusikan ke UMKM di Pasar km 5 Palembang sebanyak 59 kuesioner. Kuesioner yang kembali sebanyak 59 kuesioner. Namun berdsarakan rumus slovin yang di gunakan

peneliti untuk menentukan sample makan kuesioner yang diolah sebanyak 55 kuesioner.

Analisis Sosialiasi Perpajakan Pada Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Pasar Km 5 Kota Palembang

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 orang narasumber Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Pasar Km 5 Kota Palembang didapatkan hasil bahwa 4 dari 5 orang narasumber menyatakan bahwa tidak pernah terjadi sosialisasi perpajakan walaupun 1 dari 5 orang narasumber pun menyatakan bahwa pernah terjadi sosialisasi perpajakan namun itu pun sudah lama sekali sehingga narasumber pun lupa kapan sosialisasi itu terjadi.

Hal ini pun diperkuat berdasarkan hasil kuesioner yang di sebarakan oleh peneliti didapatkan hasil sebanyak 95% atau sebanyak 52 orang dari 55 orang menyatakan bahwa tidak pernah terjadi sosialisasi perpajakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner ini pun dapat diketahui bahwa memang kurangnya sosialiasi pemerintah kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Pasar Km 5 Kota Palembang khususnya pada bidang perpajakan hingga dapat dikatakan wajar bahwa banyak pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah

(Umkm) Pasar Km 5 Kota Palembang minim pengetahuan perpajakan sehingga mereka tidak mengetahui pentingnya untuk memiliki Npwp, apalagi bagi umkm yang sudah harus membayar pajak sesuai peraturan pemerintah yang berlaku, tentu harus terlebih dahulu memiliki Npwp sebelum menyetorkan pajaknya.

Analisis Pelayanan perpajakan pada pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pasar Km 5 Kota Palembang

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 orang narasumber Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Pasar Km 5 Kota Palembang didapatkan hasil bahwa 5 dari 5 orang narasumber menyatakan bahwa pelayanan perpajakan yang mereka dapatkan sudah baik seperti yang dikatakan oleh salah satu narasumber pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sangat baik itu terbukti saat mereka membayar pajak bumi dan bangunan serta pajak kendaraan bermotor mereka mengaku selalu mendapatkan bantuan yang mereka perlukan dalam mengurus pajak tersebut.

Hal ini pun diperkuat berdasarkan hasil kuesioner yang di sebarakan oleh peneliti didapatkan hasil sebanyak 93% atau sebanyak 51 orang dari 55 orang menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak sudah baik

serta didapatkan hasil sebanyak 95% atau sebanyak 52 orang dari 55 orang menyatakan petugas pajak memberikan perhatian terhadap masalah yang mereka alami dalam pembayaran pajak.

Dari pernyataan di atas pun dapat di simpulkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak sudah baik ini pun dapat meningkatkan minat pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Pasar Km 5 Kota Palembang untuk membayar pajak karena dengan pelayanan yang baik membuat wajib pajak merasa nyaman dalam membayar pajak, dengan meningkatnya pembayaran pajak tentu dapat meningkatkan pula kesadaran dalam kepemilikan NPWP.

Analisis Kualitas Individu Wajib Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pasar Km 5 Kota Palembang

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 orang narasumber UMKM Pasar Km 5 Kota Palembang didapatkan hasil bahwa 3 dari 5 orang narasumber setuju untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka jika memang itu kewajiban sedangkan 2 orang lainnya mereka mengaku keberatan untuk membayar pajak tertentu ini diakibatkan mereka merasa keberatan akan peraturan yang ada, hingga munculnya stigma negatif terhadap peraturan perpajakan tertentu misalnya

salah satu narasumber merasa keberatan untuk membayar pajak penghasilan UMKM. Namun dilihat dari ketepatan waktu mereka semua mau membayar pajak tepat waktu mereka menyatakan tidak ada masalah membayar pajak tepat waktu jika memang itu sudah ketentuannya dan tidak merugikan mereka.

Namun kita juga dapat berkaca pada hasil kuesioner yang di dapatkan peneliti yaitu sebanyak 89% atau sebanyak 49 orang dari 55 orang setuju untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan mereka dan sebanyak 87% atau sebanyak 48 orang dari 55 orang mau membayar pajak tepat waktu tanpa dipengaruhi atau di paksa orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner dapat di simpulkan bahwa kualitas individu pada UMKM di pasar km 5 kota Palembang rata-rata sudah baik namun ada beberapa memang yang masih memiliki stigma negatif terhadap perpajakan di Indonesia.

Analisis tingkat pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di pasar km 5 kota Palembang

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 orang narasumber UMKM Pasar Km 5 Kota Palembang didapatkan hasil bahwa 4

dari 5 orang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui bahwa setiap orang yang memiliki penghasilan harus membayar pajak penghasilan sesuai peraturan yang berlaku namun salah satu dari mereka mengaku mengetahui akan hal tersebut namun mengaku keberatan akan peraturan yang ada.

Penulis menanyakan perihal Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada 5 orang narasumber dan di dapatkan 4 dari 5 orang narasumber tidak mengetahui sama sekali apa itu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Hal ini pun di perkuat dengan hasil kuesioner yang peneliti bagikan yaitu sebanyak 85% atau sebanyak 47 orang dari 55 orang mengaku tidak mengetahui bahwa setiap orang yang memiliki penghasilan harus membayar pajak penghasilan sesuai peraturan yang berlaku dan sebanyak 75% atau sebanyak 41 dari 55 orang tidak mengetahui bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan syarat untuk menjadi seorang wajib.

Hal ini pun membuktikan bahwa kurangnya pengetahuan perpajakan pada pemilik UMKM di Pasar Km 5 yang mungkin disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah pada UMKM di pasar km5 kota Palembang. sehingga wajar rata – rata dari mereka pun tidak memiliki Npwp. Hal ini pun

berdampak kepada kesadaran mereka dalam membayar pajak dan memiliki NPWP.

Analisis Pengaruh Tingkat Ekonomi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Pasar Km 5 Kota Palembang

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 orang narasumber UMKM Pasar Km 5 Kota Palembang didapatkan hasil bahwa 5 dari 5 orang narasumber menyatakan bahwa penghasilan sangat berpengaruh dalam kewajiban membayar pajak mereka bahkan salah satu dari narasumber mengatakan jika penghasilannya sedang tidak bagus kalau bisa tidak perlu membayar pajak. bahkan 5 dari 5 orang narasumber yang di wawancara menyatakan bahwa mereka tidak ingin membayar pajak jika kondisi keuangan mereka sedang tidak bagus.

Hal ini di perkuat dengan hasil kuesioner yang di bagikan peneliti yaitu sebanyak 93% atau sebanyak 51 dari 55 orang mengatakan bahwa penghasilan berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan mereka. Serta sebanyak 56% sebanyak 31 dari 55 orang mengatakan tidak setuju untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka apapun kondisi keuangan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara serta kuesioner dapat di simpulkan bahwa tingkat ekonomi wajib pajak berpengaruh dalam kewajiban membayar pajak pada UMKM di pasar km 5 kota Palembang. Jika penghasilan mereka berkurang ataupun kondisi keuangan mereka sedang tidak bagus mereka pun tidak ingin membayar pajak. hal ini pun menyebabkan kesadaran mereka dalam kepemilikan Npwp pun berkurang karena munculnya rasa enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Analisis Persepsi Yang Baik Atas Sistem Perpajakan Yang Diterapkan Di Indonesia Pada Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Pasar Km 5 Kota Palembang

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 orang narasumber UMKM Pasar Km 5 Kota Palembang didapatkan hasil bahwa 4 dari 5 orang narasumber menyatakan bahwa sistem perpajakan atau peraturan perpajakan di indonesia masih belum baik, salah satu narasumber pun berpendapat bahwa sistem perpajakan atau peraturan perpajakan yang berlaku di indonesia tidak membedakan golongan kecil dengan golongan besar mereka berpikir pajak yang harus mereka bayarkan sama saja.

Peneliti pun bertanya apakah peraturan perpajakan di negara kita tidak

merugikan bapak/ibu sebagai wajib pajak, 4 dari 5 orang narasumber pun menjawab bahwa mereka merasakan dirugikan oleh peraturan perpajakan yang berlaku di negara ini.

Hal ini pun serupa dengan hasil kuesioner yang peneliti telah sebariskan yaitu sebanyak 84% atau sebanyak 46 dari 55 orang responden menyatakan bahwa mereka tidak setuju sistem perpajakan di negara kita sudah sangat baik dan sebanyak 75% atau 41 dari 55 orang responden merasa dirugikan oleh sistem perpajakan yang ada di negara kita ini.

Dari uraian di atas pun dapat disimpulkan bahwa persepsi mereka masih sangat buruk atas sistem perpajakan yang di terapkan di Indonesia rata-rata dari mereka merasa dirugikan atas sistem perpajakan yang di terapkan di negara ini. Hal ini pun mengakibatkan timbulnya rasa malas untuk membayar pajak karena merasa pajak merugikan mereka sebagai wajib pajak sehingga berkurangnya kesadaran mereka dalam membayar pajak yang tentu mengakibatkan juga berkurangnya kesadaran mereka dalam memiliki NPWP.

Analisis Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Sebagai Sarana Dalam Administrasi Perpajakan Terhadap Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Pasar Km 5 Kota Palembang

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 orang narasumber UMKM Pasar Km 5 Kota Palembang didapatkan hasil bahwa 4 dari 5 orang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui sama sekali apa itu Nomor Pokok Wajib Pajak.

Hal ini pun diperkuat dengan hasil kuesioner yang di dapatkan oleh peneliti yaitu sebanyak 98% atau sebanyak 54 dari 55 orang responden mengatakan bahwa mereka tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan sebanyak 87% atau sebanyak 48 dari 55 orang pernah mendengar tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta didapatkan hasil bahwa sebanyak 81% atau sebanyak 45 dari 55 orang responden tidak mengetahui Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) adalah syarat administrasi dalam perpajakan.

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa memang rata-rata para pemilik UMKM Di Pasar Km 5 Kota Palembang pernah mendengar tentang NPWP tetapi mereka tidak mengetahui sama sekali apa itu NPWP hal itu pun dapat dilihat dari hasil wawancara dan kuesioner yang penulis lakukan. Ini

dikarenakan memang dari rata-rata responden dan narasumber belum memiliki NPWP serta kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah padahal banyak keuntungan yang mereka dapatkan dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Analisis Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Sebagai Sarana Menjaga Ketertiban Dalam Pembayaran Pajak Serta Pengawasan Dalam Administrasi Perpajakan Terhadap Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Pasar Km 5 Kota Palembang

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 orang narasumber UMKM Pasar Km 5 Kota Palembang didapatkan hasil bahwa 4 dari 5 orang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui sama sekali apa itu Nomor Pokok Wajib Pajak.

Hal ini pun diperkuat dengan hasil kuesioner yang didapatkan oleh peneliti yaitu sebanyak 81% atau sebanyak 45 dari 55 orang tidak mengetahui bahwa dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kita telah menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak serta di dapatkan hasil bahwa sebanyak 78% atau sebanyak 43 dari 55 orang tidak mengetahui bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) digunakan sebagai identitas diri kalau kita ingin membayar pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat di simpulkan bahwa rata-rata UMKM Di Pasar Km 5 Kota Palembang tidak mengetahui apa fungsi dan kegunaan dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu sebagai sarana menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak serta pengawasan dalam administrasi perpajakan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di simpulkan bahwa kesadaran kepemilikan NPWP pada Pengusaha UMKM Pasar Km 5 Kota Palembang selaku narasumber dan responden pada penelitian ini masih kurang, Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dan pembagian kuesioner yang dilakukan peneliti. Kurangnya kesadaran kepemilikan NPWP oleh narasumber dan responden ini di pengaruhi oleh kurangnya pengetahuan akan perpajakan serta tingkat ekonomi dan penghasilan mereka. sebanyak 98% atau 52 dari 55 orang mengaku belum pernah terjadi sosialisasi perpajakan hingga membuat mereka minim pengetahuan akan perpajakan, serta sebanyak 56% sebanyak 31 dari 55 orang menyatakan kondisi keuangan atau tingkat ekonomi yang rendah mempengaruhi kewajiban perpajakan mereka dan sebanyak 93% atau 51 dari 55 orang

menyatakan penghasilan yang sedang tidak bagus mempengaruhi kewajiban mereka dalam membayar pajak. Maka dari itu wajar bila rata-rata pelaku UMKM pada Pasar Km 5 Kota Palembang belum memiliki NPWP.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih di sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan dalam penelitian Analisis Kesadaran Pengusaha UMKM Dalam Kepemilikan Npwp Pada Pengusaha UMKM Pasar Km 5 Kota Palembang sehingga penelitian ini dapat di tuangkan dalam bentuk tulisan dan dapat di informasikan kepada pihak pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Ada 313 Ribu UKM di Bali, Kebanyakan Belum Punya NPWP. kumparan.com.(Online)(<https://kumparan.com/kumparanbisnis/ada-313-ribu-ukm-di-bali-kebanyakan-belum-punya-npwp>)(Diakses 28 Juni 2020).

Ahmad Juanda, dkk (2015) *Membangun Ekonomi Nasional yang kokoh*. Malang:Universitas Muhammadiyah Malang.

Andjar Prasetyo (2016) *Ukm,Kelayakan Usaha Dan Pengukuran Kinerja*. Jakarta:Indocamp.

Ardo Bani Putra, 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm)

Pakaian Jadi Untuk Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (Npwp) <https://core.ac.uk/download/pdf/35319415.pdf>

Arini T.Soemohadiwidjojo (2018) *SOP & KPI Untuk Umkm & Startup*. Jakarta:Raih Asa Sukses.

Bambang Yuniarto (2018) *Membangun Kesadaran Warga Negara Dalam Kelestarian Lingkungan*. Yogyakarta:Deepublish.

I Putu Waras Wirapati dan I Ketut Jati, 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pengrajin Dalam Memiliki Npwp Di Kabupaten Gianyar https://jom.unri.ac.id/index.php/IO_MFEKON/article/download/19507/18854

Jerry RH Wuisang, Roddy Runtuwarouw, Consuslasia Korompis (2019) *Konsep Kewirausahaan dan UMKM*. Sulawesi Utara:Yayasan Makaria Waya.

Kautsar Riza Salman Dan Heru Tjakara (2019) *Pengantar Perpajakan*. Jakarta:Indeks Jakarta

Kennet Carter Dan Collen M.Seifert (2017) *Psikologi umum*. Jakarta:Kedokteran EGC.

Kepatuhan Pengusaha UMKM Membayar Pajak Rendah. [republika.co.id](https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/06/27/pazc5i383-kepatuhan-pengusaha-umkm-membayar-pajak-rendah).(Online)(<https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/06/27/pazc5i383-kepatuhan-pengusaha-umkm-membayar-pajak-rendah>).(Diakses 20 april 2020).

Leo Agung Danang Dwi Pangestu (2017). *Perpajakan Brevet A dan B*.

- Yogyakarta: CAPS (center for academic publishing service).
- Liberti Pandiangan (2014). *Administrasi perpajakan (pedoman praktis bagi wajib pajak di indonesia)*. Jakarta:Erlangga.
- M . Azrul Tanjung (2017) *Koperasi Dan Umkm*. Jakarta:Erlangga.
- Mardiasmo (2016) *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta:Andi.
- Megahsari Seftiani Mintje, 2015. Pengaruh Sikap, Kesadaran, Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (Umkm) Dalam Memiliki (Npwp) (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Manado).
- Meri, dkk, 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Umkm) Dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (Survey Pada wajib Pajak Pemilik Umkm Yang Terdaftar Di Kpp PratamaBarat)<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/8167/7270/>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) (2015). Jakarta:Bank Indonesia.
- Shofuro Zahrotul Jannah, 2016. Pengaruh Pengetahuan, Penghasilan, Manfaat Atas Npwp, Sanksi, Dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Pemilik Umkm Dalam Memiliki Npwp (Studi Di Kpp Pratama Surakarta) <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/11851/11411>
- Siti Resmi (2017) *Perpajakan Teori dan kasus (Edisi 10)*. Jakarta:Salemba Empat.
- Siti Resmi (2019) *Perpajakan Teori dan kasus (Edisi 11)*. Jakarta:Salemba Empat.
- Siti Kurnia Rahayu (2017) *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)*. Bandung:Rekayasa Sains.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- V.Wiratna sujarweni (2019) *Akuntansi UMKM*. Yogyakarta:Pt. Pustaka Baru.
- V.Wiratna sujarweni (2019) *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dpahami*. Yogyakarta:Pustakabarupress.
- Waduh, Jumlah UMKM Ber-NPWP Masih Rendah. solopos.com.(Online)(<https://www.solopos.com/waduh-jumlah-umkm-ber-npwp-masih-rendah-862382>).(Diakses 28 Juni 2020).
- Waluyo (2017) *Perpajakan Indonesia*. Jakarta:Salemba Empat

Zulfi Arsad (2017) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (Npwp) Pada Pemilik Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kabupaten Kampar
<http://eprints.iain-surakarta.ac.id/253/1/12.%20Shofuro%20Zahrotul%20Jannah.pdf>